



**ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERKAIT ANCAMAN  
PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI**

**Winna Angelina<sup>a</sup>, Nicholas Sunaidi<sup>b</sup>, Vina Sonata<sup>c</sup>, Jackson<sup>d</sup>, Jason<sup>e</sup>, Hery Haryanto<sup>f</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [2141146.winna@uib.edu](mailto:2141146.winna@uib.edu), Universitas Internasional Batam

<sup>b</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [2141280.nicholas@uib.edu](mailto:2141280.nicholas@uib.edu), Universitas Internasional Batam

<sup>c</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [2141241.vina@uib.edu](mailto:2141241.vina@uib.edu), Universitas Internasional Batam

<sup>d</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [2141270.jackson@uib.edu](mailto:2141270.jackson@uib.edu), Universitas Internasional Batam

<sup>e</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [2141288.jason@uib.edu](mailto:2141288.jason@uib.edu), Universitas Internasional Batam

<sup>f</sup> Fakultas Bisnis dan Manajemen / Manajemen, [hery.haryanto@uib.ac.id](mailto:hery.haryanto@uib.ac.id), Universitas Internasional Batam

**ABSTRACT**

*The inflation and the unemployment rate can be used as benchmarks for whether a region's economy is good or bad. This study aims to analyze how the government's policies related to the threat of unemployment after rising inflation. The object used in this study is Batam City and analyzed using secondary data from 2017 – 2022 obtained from BPS and other supporting sources. From the results of this analysis, it is known that the unemployment rate in Batam City has been handled quite well due to a decrease although overall it is still high. Meanwhile, the inflation rate in Batam City is also in the good category and can still be controlled. Therefore, it can be concluded that the inflation rate can affect the rise and fall of the unemployment rate accompanied by certain other factors.*

**Keywords:** *Inflation, Unemployment, Government Policies, Economy, Batam*

**ABSTRAK**

Tingkat inflasi dan pengangguran dapat dijadikan tolok ukur baik atau buruknya perekonomian suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran setelah kenaikan inflasi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Batam dan dianalisis menggunakan data sekunder tahun 2017 – 2022 yang diperoleh dari BPS dan sumber pendukung lainnya. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa tingkat pengangguran di Kota Batam sudah tertangani dengan cukup baik karena mengalami penurunan walaupun secara keseluruhan masih tinggi. Sementara itu, tingkat inflasi di Kota Batam juga berada dalam kategori baik dan masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat pengangguran disertai dengan faktor-faktor tertentu lainnya.

**Kata Kunci:** *Inflasi, Pengangguran, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi, Batam*

**1. PENDAHULUAN**

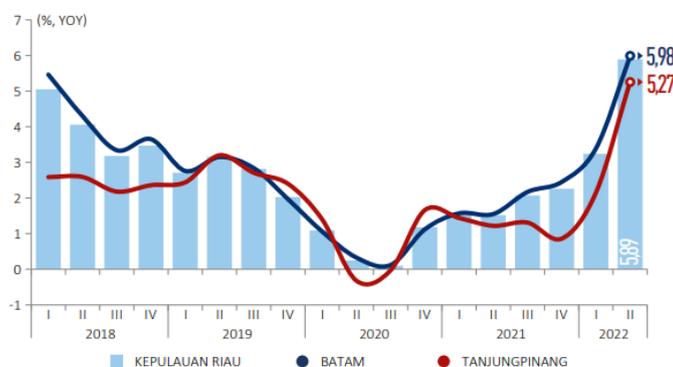
Pada zaman sekarang ini, semua negara sedang menghadapi virus Covid-19 yang menyebabkan perekonomian terganggu. Banyak sekali perusahaan yang tutup akibat terdampak Covid-19. Salah satu alasan perusahaan tidak dapat bertahan karena terjadinya inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang diakibatkan banyak hal secara terus menerus [1]. Covid-19 menyebabkan kesusahan bagi banyak produsen untuk menstabilkan harga barang yang dijual. Dampak dari ketidakstabilan harga ini adalah harga di pasaran yang terus meningkat. Perusahaan yang terkena dampak ini pun harus berusaha menekan harga agar dapat terus bertahan demi memperoleh keuntungan. Perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam kondisi ini, secara perlahan akan mulai hilang eksistensinya bahkan kemungkinan terburuknya akan mengalami kebangkrutan.

Batam merupakan salah satu kota kecil tempat banyak industri membangun usahanya. Salah satu industri yang paling terkena dampaknya di Kota Batam adalah perhotelan. Sebanyak 75 hotel pada semester 2 tahun 2020 telah tutup, salah satunya adalah Hotel Harmoni yang berada di Nagoya dimana dulu merupakan hotel ternama di Kota Batam [2]. Hotel memiliki banyak komponen biaya seperti biaya bahan baku dalam restoran yang dikelola hotel, biaya perawatan hotel, dan masih banyak lagi lainnya. Efek dari inflasi ini adalah membuat keseluruhan biaya yang dimiliki hotel menjadi meningkat. Meningkatnya seluruh biaya membuat perusahaan tidak mampu bertahan sehingga mengalami kebangkrutan. Terdapat dampak yang besar efek dari penutupan perusahaan yaitu banyak pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Akibat dari PHK ini adalah meningkatnya angka pengangguran di Kota Batam.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Batam 2017-2021

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2017	2018	2019	2020	2021
Batam	7.82	8.93	7.72	11.79	11.64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 1. Tingkat Inflasi di Kota Batam 2018-2022

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tinggi di Kota Batam. Hal ini dapat berdampak kepada semua sektor kehidupan masyarakat dimulai dari tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang dapat bertambah. Perlu langkah dari pemerintah agar hal ini dapat berkurang. Pemerintah harus dapat menekan angka inflasi agar perusahaan tidak mengalami kesusahan yang menyebabkan kebangkrutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi pengangguran pasca kenaikan inflasi yang terus terjadi. Karena salah satu hal nyata yang sudah terjadi adalah kenaikan bahan baku makanan dan bensin yang menjadi keluhan masyarakat kepada pemerintah pada saat ini. Walaupun bensin telah turun kembali, hal ini tetap menyulitkan masyarakat karena harga tidak seperti awal sebelum terjadinya kenaikan. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar pemerintah dapat mendapatkan ide untuk mengatasi permasalahan nyata yang terjadi sekarang ini. Pemerintah dapat menekan inflasi, banyak perusahaan yang mampu bertahan dan pengangguran diharapkan berkurang. Oleh sebab inilah, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pasca terjadinya inflasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi [3] adalah suatu proses perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang diproduksi dalam masyarakat terjadi peningkatan. Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko [4] terdapat beberapa alat yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

- 1) Produk Domestik Bruto, yaitu nilai jasa atau produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara [5].
- 2) Produk Domestik Bruto Per Kapita, merupakan suatu indikator yang dapat mengukur atau untuk mengetahui seberapa maju atau sukses suatu wilayah.

- 3) Pendapatan Per Jam Kerja, adalah pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah jam pekerjaan dilakukan.

## 2.2. Pengangguran

Pengangguran [6] adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan pengangguran apabila dalam 4 minggu tidak memiliki pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan apapun. Sedangkan menurut Sakernas dalam Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional [7] pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan; membuat usaha atau mencari pekerjaan baru; mereka yang tidak mencari pekerjaan dan merasa putus asa karena mereka berpikir mencari pekerjaan merupakan hal yang sulit dan mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah karena kurangnya lapangan kerja. Berikut adalah jenis pengangguran:

- 1) Pengangguran terselubung, ialah tenaga kerja yang bekerja tidak secara optimal atau maksimal dikarenakan alasan tertentu [8].
- 2) Setengah menganggur, ialah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu [9].
- 3) Pengangguran terbuka, ialah tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali [10].

Adapun dampak pengangguran terhadap perekonomian [11] adalah pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya; pengangguran dapat membuat pendapatan pajak pemerintah berkurang; dan pengangguran dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran:

- 1) Pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang sifatnya sementara dikarenakan adanya perbedaan antara pelamar dan persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan [12].
- 2) Pengangguran konjungtural, terjadi karena naik turunnya ekonomi sehingga mengakibatkan turunnya daya beli dan berkurangnya produksi barang atau jasa, [13].
- 3) Pengangguran struktural, terjadi karena kemerosotan faktor sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerjaan dihentikan [14].

## 2.3. Inflasi

Inflasi [15] merupakan proses peningkatan harga barang atau jasa secara berkelanjutan dalam *range* waktu tertentu. Menurut para ahli [16], inflasi ialah proses kenaikan harga umum secara terus menerus selama periode tertentu. Secara garis besar terdapat 3 kelompok teori mengenai inflasi:

- 1) Teori Kuantitas [17], adalah kuat atau lemahnya nilai uang dapat bergantung pada jumlah uang yang beredar dipasaran. Jika jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat maka nilai uang akan menurun menjadi setengah atau menjadi seperti harga uang sebelumnya.
- 2) Teori Keynes [18], merupakan suatu inflasi yang terjadi dikarenakan masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi.
- 3) Teori Strukturalis [19], merupakan inflasi jangka panjang yang disebabkan oleh kekuatan struktur ekonomi. Salah satunya ialah *supply* bahan makanan dan komoditas ekspor.

Terdapat faktor yang dapat memengaruhi nilai inflasi di Indonesia [20] yaitu jumlah uang beredar, kurs rupiah terhadap dollar, dan suku bunga. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat terbagi menjadi:

- 1) Inflasi ringan, yaitu inflasi yang belum mengganggu perekonomian [21].
- 2) Inflasi sedang, yaitu inflasi yang belum mengganggu perekonomian namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap.
- 3) Inflasi tinggi, yaitu inflasi yang dapat tergolong parah dikarenakan membuat harga barang atau jasa menjadi meningkat 5 hingga 6 kali dari normalnya.
- 4) Inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan tidak dapat dikendalikan [22].

## 2.4. Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Menurut Phillips (1929) dan hasil pengamatannya [23] menyatakan ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip. Dengan tingginya harga, permintaan masyarakat juga bertambah. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan maka perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya

menjadi lebih banyak sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi dan angka pengangguran menjadi berkurang.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan analisa dengan menegaskan validitas, reliabilitas, dan relevansi dari apa yang diukur, serta mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic, dengan data penelitian berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan [24]. Objek dari penelitian ini adalah tingkat pengangguran di Kota Batam. Sampel diambil menggunakan *purposive sampling* dengan parameter pengambilan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi tidak langsung, yaitu menggunakan data statistik yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) serta sumber pendukung lain yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa angka pengangguran dan tingkat inflasi di Kota Batam dengan *time series data* dari tahun 2017 – 2022.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan ekonomi yang selalu berubah dan berkembang dari tahun ke tahun, membuat harga barang dan jasa juga ikut naik. Hal ini biasa disebut sebagai inflasi. Inflasi merupakan fenomena yang wajar terjadi di dalam suatu daerah maupun negara. Hingga bulan Juli 2022, tercatat bahwa Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm) atau sebesar 6,15% (yoy) yang dimana masih kategori lumayan rendah untuk di seluruh Sumatera. Tinggi rendahnya angka inflasi bisa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi tentulah bukan hal yang bagus untuk masyarakat di daerah yang jumlah penduduknya cukup besar dan angka penganggurannya tinggi. Adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena pandemi Covid-19 juga membuat banyak sektor industri dan perusahaan di Kota Batam banyak melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Kota Batam adalah salah satu kota kawasan industri di Indonesia yang memiliki infrastruktur paling mumpuni untuk mendukung kebutuhan industri serta investasi. Mengikuti hal tersebut, mobilitas penduduk di Kota Batam juga semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun sehingga dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi pula. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Kepulauan Riau, tercatat bahwa angka pengangguran terbuka di Kota Batam hingga bulan Agustus tahun 2021 menyentuh angka 11,64% yang dimana merupakan angka terbesar di antara seluruh kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran meningkat drastis semenjak inflasi terjadi karena Covid-19. Menghadapi peristiwa ini, terdapat beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam untuk menghadapi ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Kebijakan ini dibagi menjadi 4 kebijakan publik utama yang meliputi:

#### 4.1 Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial yang telah dilakukan pemerintah Kota Batam untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terdiri atas pembangunan infrastruktur untuk menarik investor dan mendukung pariwisata Kota Batam sehingga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Hal ini dapat terlihat dari gencarnya pihak pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur kota selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, tingginya angka pengangguran juga disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Terkait hal ini, pemerintah Kota Batam melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui alokasi APBD yang sengaja disisihkan 20% untuk mendukung pendidikan dan juga tenaga pendidik, serta adanya kurikulum pembelajaran di sekolah untuk mempelajari bahasa asing dan ilmu agama. Hal ini terbukti telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing kuat. Di samping mutu pendidikan, terdapat pelatihan peningkatan kompetensi (*softskill*) untuk para pencari kerja dan pelatihan peningkatan produktivitas untuk para tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara gratis yang selalu diadakan setiap tahunnya, pelaksanaan kegiatan Batam *Job Fair* (bursa kerja) dan program prakerja.

#### 4.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di Kota Batam yaitu pembebasan pajak. Agar kebijakan fiskal mencapai tujuannya, pemerintah dapat mengurangi,

menambah, menunda pembayaran pajak ataupun meniadakan pajak. Dalam hal ini, Kota Batam termasuk kota yang meniadakan atau membebaskan pajak dikarenakan Batam termasuk ke dalam kota industri sehingga kebijakan ini bertujuan untuk menarik perhatian investor berinvestasi di Kota Batam. Apabila dilakukan pengurangan pajak tersebut, maka inflasi Kota Batam akan mengalami kenaikan sehingga menyebabkan angka pengangguran menurun. Angka pengangguran bisa turun karena ketika banyak investor yang berinvestasi pasti menghasilkan suatu proyek atau lapangan kerja baru dan membutuhkan tenaga kerja tambahan.

#### 4.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimana keputusannya akan berdampak ke seluruh daerah di Indonesia. Sejak terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, tingkat inflasi dunia melonjak tinggi karena harga barang yang terus naik akibat perang tersebut. Untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga bank agar jumlah uang yang beredar berkurang dan masyarakat lebih memilih untuk menabung uang mereka dibandingkan meminjam uang. Suku bunga yang naik ini akan menyebabkan pengangguran di Kota Batam mengalami kenaikan karena berkurangnya jumlah permintaan terhadap barang sebagai akibat dari turunnya inflasi.

#### 4.4 Kebijakan Pendapatan

Kota Batam merupakan kota dengan UMK yang dapat dibidang tinggi yaitu Rp.4.186.359 dibandingkan dengan kota lain di provinsi yang sama. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi di Kota Batam yang lebih pesat dibanding kota lainnya di provinsi Kepulauan Riau. UMK akan terus naik mengikuti tingkat kenaikan inflasi. Secara teoretis, kondisi perekonomian suatu daerah yang bagus akan membuat inflasi naik dan berakibat pada menurunnya angka pengangguran. Akan tetapi, UMK suatu daerah dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan dalam mencari tenaga kerja. Apabila gaji yang harus dibayarkan semakin tinggi maka pengangguran akan meningkat dikarenakan perusahaan akan lebih sedikit mempekerjakan karyawan. Semakin banyak angka penduduk yang pengangguran, maka perekonomian suatu daerah akan menurun yang menyebabkan semakin besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Perusahaan akan lebih banyak mempertahankan karyawan lama dengan menaikkan gaji mereka dibandingkan dengan harus membayar gaji karyawan baru lagi, maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar akibat hal tersebut. Pendapatan orang yang sudah bekerja semakin meningkat sedangkan orang lain yang belum bekerja semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Untuk pengendalian inflasi, pemerintah Kota Batam juga menetapkan adanya kebijakan harga eceran tertinggi (HET) agar setiap barang dijual dengan harga yang wajar.

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat inflasi dan angka pengangguran suatu daerah bisa menjadi tolak ukur baik buruknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari hasil data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inflasi yang naik tidak serta merta membuat pengangguran turun, begitu pula sebaliknya karena terdapat faktor-faktor penyebab lain seperti kurangnya kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Walaupun angka pengangguran di Kota Batam masih termasuk tinggi, akan tetapi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Batam terbukti cukup mampu menurunkan angka pengangguran dari 2020 ke 2021 karena perekonomian negara yang juga mulai dalam pemulihan semenjak Covid-19. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk menghadapi inflasi sudah cukup baik yang dapat dilihat dari kenaikan inflasi Kota Batam yang masih termasuk inflasi ringan karena di bawah 10%.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nurdin, "Imbas Corona, 75 Hotel di Batam Tutup," *Liputan6*, 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4315823/imbac-corona-75-hotel-di-batam-tutup> (diakses Okt 28, 2022).
- [2] Bank Indonesia, "Inflasi," 2022. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx> (diakses Okt 28, 2022).
- [3] H. Ardiansyah, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *J. Manag. Small Mediu. Enterp.*, vol. 13, no. 3, hal. 327–340, 2020, doi: 10.35508/jom.v13i3.3311.
- [4] A. Salim dan Fadilla, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari," *Ekon. Sharia J. Pemikir. dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 1, hal. 17–28, 2021.

- [5] I. S. Larasati dan S. Sulasmiyati, "Pengaruh inflasi, ekspor dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Bruto," *J. Adm. Bisnis*, vol. 63, no. 1, hal. 8–16, 2018.
- [6] K. Kasmawati dan H. Banjarnahor, "PENGARUH INFLASI, INVESTASI DAN UPAH MINIMUMKOTA TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA BATAM," *Sci. J. J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 2, 2019.
- [7] A. Kaharu, J. Biringan, dan M. Keintjem, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. PPKn Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 1, hal. 1–6, 2021.
- [8] T. Nadhifah dan M. G. Wibowo, "Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 24, no. 1, hal. 39–52, 2021.
- [9] Ms. Drs. Sugiyanto, "KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA," 2019.
- [10] Y. Alfianto, "ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERBUKA, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2011-2018)," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, hal. 1689–1699, 2020.
- [11] C. N. Rianda, "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual," *At-Tasyri' J. Ilm. Prodi Muamalah*, vol. 12, no. 1, hal. 17, 2020, doi: 10.47498/tasyri.v12i01.358.
- [12] M. Jafar, A. Ramli, dan M. Rakib, "Strategi Peningkatan Kesiapan Berwirausaha Siswa SMK Dalam Menjawab Tantangan Pengangguran Friksional Di Kabupaten Pangkep," vol. 1, no. 1, hal. 124–130, 2022.
- [13] S. P. M. P. Anna Monalita de Fretes, "ketenagakerjaan," *Gastron. ecuatoriana y Tur. local.*, vol. 1, no. 69, hal. 5–24, 2020.
- [14] M. K. Sholihin, "GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis , PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN Muhamad Khoirus Sholihin Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pengaruh upah minimum . dan tingkat pengangguran terha," vol. 01, no. 01, hal. 1–7, 2021.
- [15] M. N. Febriahendika Putra, "Pengaruh Inflasi, Likuiditas dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2020," vol. 2, hal. 1–9, 2020.
- [16] U. Bakti dan M. S. Alie, "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Investasi di Provinsi Lampung Periode 1980-2015," *J. Ekon.*, vol. 20, no. 3, hal. 275–285, 2018.
- [17] T. Permana dan A. Puspitaningsih, "Fenomena uang digital," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 9, no. 2, hal. 363–373, 2019.
- [18] F. S. Dewi, I. G. B. Indrajaya, dan I. K. Djayastra, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994-2013," *Ekon. Pembang.*, vol. 6, no. 1, hal. 20–35, 2017.
- [19] I. R. Weley, A. G. Kumenaung, dan J. I. Sumual, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado," *J. Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, vol. 19, no. 3, hal. 1–10, 2019, doi: 10.35794/jpekd.16457.19.3.2017.
- [20] H. Aghisna, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2000-2015," 2019.
- [21] R. H. Dwi Putri Utari, "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Saham Perusahaan PT Kalbe Farma Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," vol. 1, no. 1, hal. 25–34, 2019.
- [22] J. P. Simbolon, "ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA TAHUN 2005-2021," 2022.
- [23] A. R. Syahputri, "Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Negara Vietnam dan Indonesia," hal. 1–9, 2020.
- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.